

LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN DANA BOS



TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- | | |
|---|------------------|
| 1. Farmansjah Maliki, SE., MM | NIDN. 0303126803 |
| 2. Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc | NIDN. 0325036001 |
| 3. Dr. Lies Zulfiati, SE., M.Si., Ak., CA | NIDN. 0325037601 |
| 4. Dr. Dahlifah, SE., M.Si., CSRS., CSRA | NIDN. 0331127504 |
| 5. Dr. Krishna Kamil, SE., MBA., CPA | NIDN. 0304015801 |

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
JAKARTA
2022

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

LAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN DANA BOS

Ketua Tim PKM

1. Farmansjah Maliki, SE., MM NIDN : 0303126803

Anggota Tim

1. Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc NIDN : 0325036001
2. Dr. Lies Zulfiati, SE., M.Si., Ak., CA NIDN : 0325037601
3. Dr. Dahlifah, SE., M.Si., CSRS., CSRA NIDN : 0331127504
4. Dr. Krishna Kamil, SE., MBA., CPA NIDN : 0304015801

Lokasi Kegiatan : Kampus A STEI Ruang Auditorium Paisal Kamal Lt.5
Luaran yang diharapkan : Menambah ilmu guru dan tenaga kependidikan SMK tentang Laporan Keuangan dan Pelaporan Dana BOS
Biaya Total STEI : Rp. 3.500.000 (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
Sumber Lain : Rp. -
(*Lampirkan Surat Pernyataan Penyandang Dana*)

Jakarta, 1 Agustus 2022

Ketua Tim PKM,



Farmansjah Maliki, SE. MM

NIDN. 0303126803

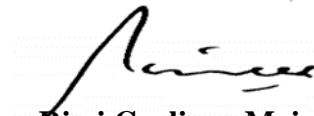
Mengetahui,
Wakil Ketua IV



Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc.

NIDN. 0325036001

Menyetujui,
Kepala P3M STEI



Rimi Gusliana Mais

NIDN. 0315087401

DAFTAR ISI

Cover Depan	
Halaman Pengesahan	ii.
Daftar Isi	iii.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
BAB II TARGET DAN LUARAN	8
2.1. Target Peserta	8
2.2. Luaran (Output)	8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	9
3.1. Tim Pelaksana Kegiatan	9
3.2. Bentuk Kegiatan	9
3.3. Waktu Dan Tempat Kegiatan	9
3.4. Jadwal Kegiatan	10
3.5. Urutan dan Metode Kegiatan	10
3.6. Rincian Waktu Persiapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Abdimas	11
3.7. Anggaran Kegiatan Abdimas	12
PENUTUP	13
LAMPIRAN	
1) Materi Kegiatan PKM	
2) Foto-foto Kegiatan PKM	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peranan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan sehingga Laporan keuangan:

- a. **Akuntabilitas**, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. **Transparansi**, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Output dari tugas pokok dan fungsi instansi/ lembaga pemerintah adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses layanan menjadi keharusan. Fakta layanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini masih rawan korupsi dalam bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi ataupun penyalahgunaan wewenang (KPK, 2016:3).

Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good government governance*. Salah satu karakteristik *good governance*, yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas diartikan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Sedangkan, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Tahir, 2012).

PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN

- Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
- Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

Perkembangan Opini LKPD di Indonesia Tahun 2012 –Tahun 2014

LKPD	Opini							Jumlah	
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2012	120	2,95	319	60,99	6	1,15	78	14,91	523
Tahun 2013	156	29,77	311	59,35	11	2,1	46	8,78	524
Tahun 2014	251	49,80	230	45,64	4	0,79	19	3,77	504

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sepanjang tahun 2014 terjadi 629 kasus korupsi dan sebanyak 1.328 tersangka yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. Kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 69 kasus dibandingkan selama tahun 2013, yaitu 560 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian Rp 7,3 triliun uang negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) akan tetapi kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah terus meningkat setiap tahunnya.

Penanggulangan Korupsi

Menyangkut korupsi di pemerintahan daerah, menurut Asis (2012) terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penilaian keinginan politik dan titik masuk untuk memulai, mendorong partisipasi masyarakat, mendiagnosa masalah yang ada, serta melakukan reformasi dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Menurut Shah (2014) pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi tersebut pada sebuah negara/ daerah sehingga perlu dipertimbangkan kondisi pengaruh dari korupsi atau kualitas dari tata kelola pemerintahan yang ada di negara/daerah tersebut.

Mengukur Tingkat Korupsi

- Tingkat korupsi yang terjadi di suatu daerah secara tepat sulit diketahui. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang 2012-2025 dan Stranas PPK jangka menengah tahun 2012-2014. Indikator utama keberhasilan Stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) dan *National Integrity System* (NIS). Sasaran utama Stranas PPK adalah menurunkan tingkat korupsi dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi.
- Survei integritas sektor publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan dalam rangka menilai tingkat integritas layanan publik dan merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan faktor penyebab terjadinya korupsi di layanan publik. Responden yang dipilih adalah yang mengurus langsung layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Nilai integritas dalam survei ini berkisar antara 0–10, yang menunjukkan bahwa semakin mendekati 10, integritas untuk layanan semakin baik dan sebaliknya jika mendekati 0, integritas layanan semakin buruk (www.kpk.go.id).

KASUS PENGELOLAAN DANA BOS

Satreksrim Polres Cirebon Kota menetapkan YH, mantan Kepala SDN 1 di Kota Cirebon sebagai tersangka kasus tipikor dana BOS anggaran 2011-2013. YH bersama beberapa temannya, memalsukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) hingga merugikan uang negara hingga Rp 472 juta. Polisi telah memeriksa beberapa berkas dan arsip LPJ yang mana terdapat sekitar **kuitansi palsu dari sekitar 30 toko**.

Kompas.com / News / Regional

Diduga Korupsi Dana BOS, Eks Kepala SD di Cirebon Ditahan

Kompas.com - 11/12/2014, 20:31 WIB

BAGIKAN:    

Komentar 



YH, terduga korupsi dana BOS di Kota Cirebon. (KOMPAS.com/MUHAMMAD SYAHRI ROMDHON)Advertisement

Advertisement

Teori Keagenan (*agency theory*)

- Hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal/rakyat melalui DPR/DPRD*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent/Pemerintah*) yang melakukan pekerjaan.
- Dalam teori agensi menyatakan diantara pihak-pihak yang berkepentingan, terdapat asimetri informasi antara pemberi amanah (*principal*) dan pemegang amanah (*agent*).
- Oleh karena itu, pemegang amanah (*agent*) wajib untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Tujuan (cont)

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
 - b. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

KASUS PENGELOLAAN DANA BOS

Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan piranti lunak pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Tersangka melakukan pengadaan bersekongkol menentukan spesifikasi barang dengan pihak ketiga serta **menerima gratifikasi dan fasilitas** dari pihak ketiga. Praktik kongkalikong dalam pembelian komputer/laptop melalui e-katalog ini yang semestinya dilakukan secara independen oleh Dispendik Riau terindikasi diatur satu perusahaan. Perusahaan tersebut mengatur mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.

Kejati Riau Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan

KASUISTIKA 21 Juli 2020, 16:34:27 WIB



Kajati Riau Mia Amiati memberikan keterangan di Pekanbaru pada Senin (20/7). (Anggi Romadhoni/Antara)

KEUTAMAAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Akuntabilitas dan Transparansi termasuk ke dalam karakteristik dari *Good Governance*

1. Akuntabel, dimana semua pihak (baik pemerintah, swasta, dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh oleh keputusan atau aktivitas yang dilakukan institusi;
2. Transparan, mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Parameternya adalah informatif dan mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh, dan dimengerti

Akuntabilitas dan Transparansi termasuk ke dalam Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

1. Asas akuntabel, berorientasi pada hasil, bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Asas keterbukaan, dalam pengelolaan keuangan negara diwajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.

Akuntabilitas dan Transparansi termasuk ke dalam Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (UU No.28 Tahun 2009)

1. Asas Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hal masyarakatan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

KASUS PENGELOLAAN DANA BOS

Laporan penggunaan dana BOS merupakan pekerjaan sampingan yang terpaksa dikerjakan oleh guru yang ditunjuk, yang mana harus diselesaikan disela-sela kesibukan mengajar. **Menyusun laporan BOS bukan merupakan tugas yang mudah karena merupakan tugas tambahan dan banyak guru yang disertai tanggung jawab tersebut tidak memiliki dasar pendidikan administrasi keuangan yang memadai.**

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, sekitar 60 persen lembaga pendidikan penerima dana tak menguasai cara menyusun laporan penggunaan dana yang benar. Termasuk membuat laporan akuntansi, pemotongan pajak pertambahan nilai dan lampiran kwitansi dan nota pembelian seperti pedoman yang dibuat Kementerian Pendidikan

Beranda > Nasional

Pelaporan, Masalah Terbesar BOS di Kota Malang

Reporter Editor

Selasa, 21 Desember 2010 12:52 WIB



TEMPO Interaktif, Malang - Bel istirahat berdering, tanda waktu istirahat sudah datang. Seluruh siswa Sekolah Dasar Tunjungsekar 1 Kota Malang, Jawa Timur, akhir November lalu, berhamburan keluar halaman sekolah. Sebagian besar langsung bermain, sementara lainnya bergegas ke kantin membeli makanan. Para guru yang sudah mengajar sedari pagi, kembali ke ruang guru. Ada yang sekadar melepas lelah dan bercengkrama dengan para koleganya.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

- Setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Aplikasi RKAS (ARKAS) merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.
- ARKAS dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target Peserta

Setelah mengikuti program pelatihan ini, peserta diharapkan :

1. Memiliki kesadaran serta penguasaan diri yang dianggap sebagai dasar dalam menjawab tantangan di areal tugas di lingkup sekolah.
2. Penguasaan diri yang lebih baik bisa memberi dampak positif di lingkungan kerja yang berujung pada kompetensi siswa yang berkembang ke arah yang lebih baik.
3. Memiliki pemahaman tentang akuntansi dan bagaimana mengelola dengan baik.

2.2. Luaran (Output)

Adapun Luaran atau output dari hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini adalah:

1. Menambah pengetahuan untuk siswa SMK.
2. Terbentuk siswa yang berprestasi dalam akuntansi.
3. Meningkatkan mutu layanan sekolah kepada siswa maupun masyarakat luas.
4. Meningkatkan eksistensi sekolah dan rasa percaya masyarakat sekitar pada institusi persekolahan.
5. Terjalin kemitraan antara perguruan tinggi dan sekolah.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Tim Pelaksana Kegiatan

- 1) Ketua Tim
 - Nama : **Farmansjah Maliki, SE., MM**
 - Jabatan Fungsional : **Dosen**
 - NIDN : 0303126803
- 2) Sekertaris
 - Nama : Drs. Jusuf Hariyanto, M.Si
 - Jabatan Fungsional : **Dosen**
 - NIDN : 0325036001
- 3) Anggota
 - Nama : Dr. Lies Zulfiati, SE., M.Si., Ak., CA
 - Jabatan Fungsional : **Dosen**
 - NIDN : 0325037601
- 4) Anggota
 - Nama : Dr. Dahlifah, SE., M.Si., CSRS., CSRA
 - Jabatan Fungsional : **Dosen**
 - NIDN : 0331127504
- 5) Anggota
 - Nama : Dr. Krishna Kamil, SE., MBA., CPA
 - Jabatan Fungsional : **Dosen**
 - NIDN : 0304015801

3.2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan dengan model kelas sehari dengan memberikan ceramah yang dilakukan oleh para nara sumber dengan materi yang berkaitan dengan *Laporan Keuangan dan Pelaporan Dana BOS*.

3.3. Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Juli 2020
Waktu : 09.30 - Selesai
Tempat : Kampus A STEI
Ruang Aula Paisal Kamal Lt.5

3.4. Jadwal Kegiatan

No.	Acara	Waktu
1.	<i>Registrasi peserta pelatihan</i>	09.00 - 09.30
2.	<i>Pembukaan Acara oleh MC</i>	09.30 - 09.45
3.	<i>Sambutan dari Perwakilan STEI</i>	09.45 - 10.00
4.	<i>Penyampaian Materi 1</i>	10.00 - 10.45
5.	<i>Penyampaian materi 2</i>	10.45 - 11.30
6.	<i>Penutup - Doa - Makan Siang</i>	11.30 - 12.00

3.5. Urutan dan Metode kegiatan

Pelaksanaan program pelatihan akuntansi ini, menggunakan metode pelatihan dibagi dalam 3(*tiga*) tahapan, yaitu tahap Persiapan Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Evaluasi.

1) Tahap Persiapan Pelatihan

Sebelum masuk tahap pelaksanaan pelatihan terlebih dahulu beberapa persiapan yang harus dilakukan antara lain :

- a. Pada tahap awal sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan di lapangan, Anggota Tim melakukan *survey* lokasi.
- b. Hasil *survey* anggota tim mengadakan rapat dalam rangka mempersiapkan pembuatan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Ketua Tim menyampaikan proposal kepada Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk di review.
- d. Hasil review dari tim reviewer proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pelaksanaan kegiatannya.
- e. Mempersiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan.
- f. Pembelian bahan baku dan peralatan penunjang yang diperlukan pelaksanaan kegiatan.

2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, pelaksanaan kegiatan pelatihan dibagi dalam 2(*dua*) sesi kegiatan yaitu :

1. Peserta terlebih dahulu diberikan materi pelatihan berupa pelatihan soft skills dalam bentuk ceramah dalam kelas serta dilanjutkan dengan metode tanya jawab.
2. Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk kegiatan simulasi kasus diawasi instruktur tentang berhubungan dengan materi yang telah diberikan.

3) Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

1. Evaluasi Struktur, hal-hal yang diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:
 - 80% peserta hadir dalam kegiatan ini
 - Media dan alat yang tersedia sesuai dengan perencanaan
 - Peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan yang direncanakan
 - Setting tempat sesuai dengan rencana
2. Evaluasi Proses, hal-hal yang diperhatikan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:
 - Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan
 - Peserta dapat mengikuti acara sampai selesai
 - Peserta mengikuti proses dengan aktif
 - Peserta tidak ada yang meninggalkan tempat selama proses
 - 80% dari peserta yang hadir aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung
3. Evaluasi hasil, hal-hal yang diperhatikan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:
 - 70% memahami tentang integritas dan arti pentingnya dalam organisasi
 - 70% memahami tentang manajemen otak dan pengaruhnya terhadap perilaku dan kinerja organisasi.

3.6. Rincian Waktu Persiapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Abdimas

No.	Tanggal	Waktu	Agenda Acara	Lama	
1.	09/01/2022	13.00 – 17.00	Pembahasan Topik Kegiatan	4	Jam
2.	12/01/2022	13.00 – 15.00	Penyusunan Panitia	2	Jam
3.	25/01/2022	13.00 – 15.00	Pembahasan Anggaran	2	Jam
4.	08/02/2022	13.00 – 17.00	Penyusunan Proposal Kegiatan	4	Jam
5.	20/02/2022	10.00 – 12.00	Pembahasan Lokasi Penyuluhan	2	Jam
6.	22/02/2022	10.00 – 15.00	Survey Lokasi	4	Jam
7.	27/02/2022	09.00 – 15.00	Pembahasan Materi dengan Pihak Sekolah	5	Jam
8.	10/03/2022	09.00 – 13.00	Penyusunan Materi I dan II	4	Jam
9.	15/03/2019	13.00 – 17.00	Pembahasan Materi dan Softcopy	4	Jam
10.	20/03/2022	13.00 – 17.00	Presentase Proposal STEI	4	Jam
11.	30/03/2022	10.00 – 14.00	Persiapan Akhir	3	Jam
12.	20/07/2022	08.00 – 17.00	Penyuluhan	8	Jam
13.	31/07/2022	10.00 – 12.00	Rapat Evaluasi dan Pembubaran Panitia	2	Jam
14.	01/08/2022	08.00 – 17.00	Pembuatan Laporan Kegiatan	4	Jam
TOTAL JAM KEGIATAN				52	Jam

3.7. Anggaran Kegiatan Abdimas

Anggaran Kegiatan Abdimas ini diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kebutuhan	Biaya	Jumlah	Total Biaya
1.	Pembuatan dan Penggandaan Proposal	Rp 10.000	5	Rp 50.000
2.	Pembuatan dan Penggandaan Laporan	Rp 25.000	5	Rp 125.000
3.	Snack dan Aqua gelas	Rp 15.000	35	Rp 525.000
4.	Makan Siang	Rp 30.000	35	Rp 1.050.000
5.	Air Mineral (Botol)	Rp 40.000	2	Rp 80.000
6.	Transportasi Survey Pendahuluan	Rp 100.000	1	Rp 100.000
7.	Dokumentasi (Cetak Photo)	Rp 100.000	1	Rp 100.000
8.	Seminar Kit (<i>Map Plastik, Makalah</i>)	Rp 15.000	30	Rp 450.000
9.	Transportasi Presenter	Rp 150.000	5	Rp 750.000
10.	Transportasi Panitia	Rp 150.000	5	Rp 750.000
11.	Sertifikat	Rp 15.000	30	Rp 450.000
Total				Rp. 4.430.000

Total Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) terbilang : *empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*

PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini diajukan, bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, semoga kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Tim Kegiatan
Pengabdian Masyarakat

Ketua Tim



Farmansjah Maliki, SE., MM
NIDN. 0303126803

Sekretaris Tim



Drs. Jusuf Hariyanto, M.Si
NIDN. 0325036001



STEI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN

Dr. Rimi Gusliana Mais., M.Si, CSRS, CSRA



LAPORAN KEUANGAN

Peranan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan sehingga Laporan keuangan:

- a. **Akuntabilitas**, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. **Transparansi**, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



LAPORAN KEUANGAN

Tabel 1

Indeks Persepsi Korupsi Di Beberapa Negara Asia Tenggara

Negara	Indeks Persepsi Korupsi					
	Peringkat	Tahun 2012	Peringkat	Tahun 2013	Peringkat	Tahun 2014
Singapura	5	87	5	86	7	84
Malaysia	54	49	53	50	50	52
Thailand	88	37	102	35	85	38
Filipina	108	34	80	36	85	38
Indonesia	118	32	114	32	107	34

Sumber: *Transparency International* Indonesia (TII), Data Diolah 2015

Output dari tugas pokok dan fungsi instansi/ lembaga pemerintah adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses layanan menjadi keharusan. Fakta layanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini masih rawan korupsi dalam bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi ataupun penyalahgunaan wewenang (KPK, 2016:3).

Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good government governance*. Salah satu karakteristik *good governance*, yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas diartikan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Sedangkan, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Tahir, 2012).

Sumber : *JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2016*



LAPORAN KEUANGAN

Pengertian

- Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
- Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.



LAPORAN KEUANGAN

Tabel 2

Perkembangan Opini LKPD di Indonesia Tahun 2012 – Tahun 2014

LKPD	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2012	120	2,95	319	60,99	6	1,15	78	14,91	523
Tahun 2013	156	29,77	311	59,35	11	2,1	46	8,78	524
Tahun 2014	251	49,80	230	45,64	4	0,79	19	3,77	504

Sumber : IHPS BPK RI, Data Diolah 2015

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sepanjang tahun 2014 terjadi 629 kasus korupsi dan sebanyak 1.328 tersangka yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. Kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 69 kasus dibandingkan selama tahun 2013, yaitu 560 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian Rp 7,3 triliun uang negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) akan tetapi kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah terus meningkat setiap tahunnya.

Sumber : *JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2016*

Penanggulangan Korupsi

Menyangkut korupsi di pemerintahan daerah, menurut Asis (2012) terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penilaian keinginan politik dan titik masuk untuk memulai, mendorong partisipasi masyarakat, mendiagnosa masalah yang ada, serta melakukan reformasi dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Menurut Shah (2014) pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi tersebut pada sebuah negara/daerah sehingga perlu dipertimbangkan kondisi pengaruh dari korupsi atau kualitas dari tata kelola pemerintahan yang ada di negara/daerah tersebut.

Mengukur Tingkat Korupsi

- Tingkat korupsi yang terjadi di suatu daerah secara tepat sulit diketahui. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang 2012-2025 dan Stranas PPK jangka menengah tahun 2012-2014. Indikator utama keberhasilan Stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) dan *National Integrity System* (NIS). Sasaran utama Stranas PPK adalah menurunkan tingkat korupsi dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi.
- Survei integritas sektor publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan dalam rangka menilai tingkat integritas layanan publik dan merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan faktor penyebab terjadinya korupsi di layanan publik. Responden yang dipilih adalah yang mengurus langsung layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Nilai integritas dalam survei ini berkisar antara 0–10, yang menunjukkan bahwa semakin mendekati 10, integritas untuk layanan semakin baik dan sebaliknya jika mendekati 0, integritas layanan semakin buruk (www.kpk.go.id).

KASUS PENGELOLAAN DANA BOS

Satreksrim Polres Cirebon Kota menetapkan YH, mantan Kepala SDN 1 di Kota Cirebon sebagai tersangka kasus tipikor dana BOS anggaran 2011-2013.

YH bersama beberapa temannya, memalsukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) hingga merugikan uang negara hingga Rp 472 juta.

Polisi telah memeriksa beberapa berkas dan arsip LPJ yang mana terdapat sekitar **kuitansi palsu dari sekitar 30 toko**.

[Kompas.com / News / Regional](#)

Diduga Korupsi Dana BOS, Eks Kepala SD di Cirebon Ditahan

Kompas.com - 11/12/2014, 20:31 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [l](#)

Komentar 0



YH, terduga korupsi dana BOS di Kota Cirebon. (KOMPAS.com/MUHAMMAD SYAHRI ROMDHONI)Advertisement

[Tautan Berita](#)

KASUS PENGELOLAAN DANA BOS

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo menahan Kepala SMPN 1 Reok berinisial HN dan bendahara sekolah, MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana BOS reguler tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Modus yang dilakukan oleh para tersangka, dalam pengelolaan dana BOS Reguler pada SMP Negeri I Reok Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah **dengan melaksanakan kegiatan fiktif.**

Mereka membagikan uang kepada para guru dan pegawai, mark up anggaran, melaksanakan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban, dan kelebihan pembayaran honor kepada para guru dan pegawai, kerugian keuangan negara yang timbul sebesar Rp 839.401.569.

Kompas.com / Regional

Korupsi Dana BOS Selama 4 Tahun, Kepsek dan Bendahara di Manggarai Ditahan

Kompas.com - 05/08/2021, 06:11 WIB

BAGIKAN:    

Komentar ³



Advertisement



LAPORAN KEUANGAN

Teori Keagenan (*agency theory*)

- hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal/rakyat melalui DPR/DPRD*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent/Pemerintah*) yang melakukan pekerjaan.
- Dalam teori agensi menyatakan diantara pihak-pihak yang berkepentingan, terdapat asimetri informasi antara pemberi amanah (*principal*) dan pemegang amanah (*agent*).
- Oleh karena itu, pemegang amanah (*agent*) wajib untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.



LAPORAN KEUANGAN

Pengertian

- Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
- Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;



LAPORAN KEUANGAN

Tujuan (cont)

- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



LAPORAN KEUANGAN

Tujuan (cont)

- Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.
- Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
 - b. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

KASUS PENGELOLAAN DANA BOS

Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan piranti lunak pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Tersangka melakukan pengadaan bersekongkol menentukan spesifikasi barang dengan pihak ketiga serta **menerima gratifikasi dan fasilitas** dari pihak ketiga.

Praktik kongkalikong dalam pembelian komputer/laptop melalui e-katalog ini yang semestinya dilakukan secara independen oleh Dispendik Riau terindikasi diatur satu perusahaan. Perusahaan tersebut mengatur mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.

Kejati Riau Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan

KASUISTIKA 21 Juli 2020, 16:34:27 WIB



Kajati Riau Mia Amiati memberikan keterangan di Pekanbaru pada Senin (20/7). (Anggi Romadhoni/Antara)



KEUTAMAAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Akuntabilitas dan Transparansi termasuk ke dalam karakteristik dari *Good Governance*

1. Akuntabel, dimana semua pihak (baik pemerintah, swasta, dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh oleh keputusan atau aktivitas yang dilakukan institusi;
2. Transparan, mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Parameternya adalah informatif dan mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh, dan dimengerti



KEUTAMAAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Akuntabilitas dan Transparansi termasuk ke dalam Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

1. Asas akuntabel, berorientasi pada hasil, bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Asas keterbukaan, dalam pengelolaan keuangan negara diwajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.



KEUTAMAAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Akuntabilitas dan Transparansi termasuk ke dalam Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (UU No.28 Tahun 2009)

1. Asas Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hal masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



KASUS KORUPSI DANA BOS SD SENILAI Rp17,1 MILIAR

06:12 WIB

BNPB AWASI POTENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI USAI TERJADI GEMPA VULKANIK

KASUS PENGELOLAAN DANA BOS

Laporan penggunaan dana BOS merupakan pekerjaan sampingan yang terpaksa dikerjakan oleh guru yang ditunjuk, yang mana harus diselesaikan disela-sela kesibukan mengajar.

Menyusun laporan BOS bukan merupakan tugas yang mudah karena merupakan tugas tambahan dan banyak guru yang disertai tanggung jawab tersebut tidak memiliki dasar pendidikan administrasi keuangan yang memadai.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, sekitar 60 persen lembaga pendidikan penerima dana tak menguasai cara menyusun laporan penggunaan dana yang benar. Termasuk membuat laporan akuntansi, pemotongan pajak pertambahan nilai dan lampiran kwitansi dan nota pembelian seperti pedoman yang dibuat Kementerian Pendidikan

Beranda > Nasional

Pelaporan, Masalah Terbesar BOS di Kota Malang

Reporter Editor

Selasa, 21 Desember 2010 12:52 WIB



TEMPO Interaktif, Malang - Bel istirahat berdering, tanda waktu istirahat sudah datang. Seluruh siswa Sekolah Dasar Tunjungsekar 1 Kota Malang, Jawa Timur, akhir November lalu, berhamburan keluar halaman sekolah. Sebagian besar langsung bermain, sementara lainnya bergegas ke kantin membeli makanan. Para guru yang sudah mengajar sedari pagi, kembali ke ruang guru. Ada yang sekadar melepas lelah dan bercengkrama dengan para koleganya.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- Setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Aplikasi RKAS (ARKAS) merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.
- ARKAS dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan.



■ Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua



